

Peran Pemerintah Dalam Menghadapi Tantangan Demokrasi Akibat Diskriminasi Ekonomi: Studi Kasus Hak Kesempatan Kerja Di Papua

Bella Argoebie¹, Raisha Sizdah², Syahwa Fitria Kurniawan³,
Ardhana Ulfa Azis⁴

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ardhanaulfa@gmail.com

Abstract

The right to employment in Papua is still a crucial issue that is included in the challenges of democracy in Indonesia. It is evident from the 6.48% open unemployment rate that is still high in Papua because indigenous Papuans feel the inequality of access they get compared to immigrant groups. The problem studied is how the government's role in facing democratic challenges arising from economic discrimination, especially related to the right to employment opportunities in Papua. This research identifies the specific role of the government in reducing unequal access to employment and the impacts of this problem on democratic stability and explores how this economic injustice affects the principle of inclusiveness in Indonesian democracy. The researcher used a qualitative method approach that drew data sources from books, journals, previous research, and data from various websites on the internet. The research process involves systematic data collection techniques through observation and analysis of documents or archives related to the research subject, such as records of reports, books, or official documents. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the central and regional governments have made many efforts to provide solutions to the problem of solving the challenges to democracy that occur in Papua. This is evidenced by the discovery of various special policies made by the central government for Papua such as the special autonomy policy, affirmation quota, scholarships to the Papua youth creative hub program. The author hopes that this research is useful for reference or foundation and supports further research and can be useful for the advancement of political science.

Keywords: Economic Discrimination, Democracy, Papua.

Abstrak

Hak kesempatan kerja di Papua masih menjadi permasalahan krusial yang termasuk ke dalam tantangan demokrasi di Indonesia. Terbukti dari angka 6,48% tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi di Papua disebabkan oleh orang asli Papua merasakan ketimpangan akses yang mereka dapatkan dibandingkan dengan kelompok pendatang. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran pemerintah menghadapi tantangan demokrasi yang timbul akibat diskriminasi ekonomi, khususnya terkait hak kesempatan kerja di Papua. Penelitian ini mengidentifikasi peran spesifik pemerintah dalam mengurangi ketimpangan akses kerja serta dampak-dampak masalah ini pada kestabilan demokrasi serta mengeksplorasi bagaimana ketidakadilan ekonomi ini memengaruhi prinsip inklusivitas dalam demokrasi di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yang mengambil sumber data dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan data-data dari berbagai situs web di internet. Proses penelitian melibatkan teknik pengumpulan data secara sistematis melalui observasi serta analisis dokumen atau arsip yang berhubungan dengan subjek penelitian, seperti catatan laporan, buku, atau dokumen-dokumen resmi. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah banyak melakukan

segala upaya untuk memberi solusi atas penyelesaian masalah tantangan demokrasi yang terjadi di Papua. Hal ini dibuktikan dari ditemukannya berbagai kebijakan khusus yang dibuat pemerintah pusat untuk Papua seperti kebijakan otonomi khusus, kuota afirmasi, beasiswa hingga adanya program Papua youth creative hub. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk acuan atau landasan serta mendukung penelitian selanjutnya dan dapat berguna untuk kemajuan ilmu politik.

Kata kunci : *Diskriminasi Ekonomi, Demokrasi, Papua.*

A. Pendahuluan

Hak kesempatan kerja di Papua masih menjadi permasalahan yang perlu terus diangkat dan dibicarakan karena masalah ini sangat krusial dan mencerminkan tantangan fundamental bagi demokrasi di Indonesia. Demokrasi seharusnya memastikan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Namun, menurut Yuniar Sri Hartati pada 2022, menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap pekerjaan antara masyarakat asli Papua dan kelompok pendatang, yang dapat memperburuk marginalisasi ekonomi dan sosial masyarakat asli. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana ketidakadilan ekonomi ini memengaruhi prinsip inklusivitas dalam demokrasi di Indonesia.

Diskriminasi ekonomi di Papua terlihat dari kesenjangan dalam tingkat pengangguran, akses terhadap pendidikan vokasi, dan kesempatan kerja yang lebih besar bagi pekerja migran dibandingkan masyarakat asli. Selain itu, investasi besar dalam proyek infrastruktur sering kali tidak berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat setempat, melainkan lebih menguntungkan perusahaan eksternal. Fenomena ini memperkuat ketegangan antara tuntutan keadilan sosial dan dinamika pembangunan ekonomi di wilayah yang secara historis telah termarginalkan.

Penelitian sebelumnya, seperti penelitian Muhammad Ismail pada tahun 2015, telah membahas aspek diskriminasi ekonomi di Papua, seperti studi tentang ketimpangan distribusi pekerjaan, dampak investasi terhadap masyarakat lokal, dan kebijakan affirmative action. Namun, kebanyakan riset lebih fokus pada isu sektoral, seperti pendidikan dan kesehatan, sementara eksplorasi mendalam tentang keterkaitannya dengan kesempatan kerja masih terbatas.

Kebanyakan penelitian cenderung deskriptif dan kurang menyoroti hubungan langsung antara diskriminasi ekonomi dan tantangan demokrasi. Selain itu, banyak riset yang menyoroti kebijakan pemerintah secara umum tanpa mengidentifikasi bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Ada juga minimnya pendekatan berbasis partisipasi masyarakat asli Papua dalam merumuskan solusi kebijakan.

Penelitian ini akan mengusulkan kerangka kebijakan yang lebih inklusif dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk mengatasi diskriminasi ekonomi di Papua. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi peran spesifik pemerintah dalam mengurangi ketimpangan akses kerja serta dampak-dampak masalah ini pada kestabilan demokrasi.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah peran pemerintah dalam menghadapi tantangan demokrasi sebab dari adanya diskriminasi di Papua. Peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif yang mengambil sumber data dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan data-data dari berbagai situs web di internet. Dalam pendekatan ini, peneliti memulai dengan kerangka teori atau hipotesis yang sudah ada, kemudian mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung atau menolak teori tersebut. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif, menurut Moh. Nazir 1998 dalam (Rusandi & Rusli, n.d., 3) penelitian deskriptif mempelajari masalah masyarakat dan praktiknya serta situasi-situasi tertentu mencakup hubungan antara kegiatan dan sikap, perspektif, dan fenomena. Jenis penelitian ini membantu peneliti untuk memastikan bahwa masalah yang diangkat berbasis fakta dan layak untuk diteliti lebih lanjut, serta untuk memberikan deskripsi yang mendalam dan validasi terhadap fenomena tantangan demokrasi yang dihadapi oleh pemerintah akibat diskriminasi yang berada di Papua. Proses penelitian melibatkan teknik pengumpulan data secara sistematis, menurut Bogdan & Biklen, 2017 dalam (Ardianyah et al., Juli, 4) melalui observasi dalam mengamati konteks yang berkaitan dengan fenomena penyebab dari diskriminasi yang ada di Papua. Serta analisis dokumen atau arsip yang berhubungan dengan subjek penelitian, seperti catatan laporan, buku, atau dokumen-dokumen resmi (Ardianyah et al., Juli, 4) . Setelah proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1994), memadatkan data untuk memproses pemilihan data mentah, lalu menampilkan data tersebut untuk penarikan kesimpulan, setelah itu peneliti akan menyimpulkan dan memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut sudah sesuai dengan data yang dikumpulkan dan di analisis (Sarosa, 2021).

C. Pembahasan dan Temuan

Peran Pemerintah Pusat

Diskriminasi ekonomi terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan di Papua, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

rata-rata nasional, menjadi indikator nyata dari ketimpangan ini. Salah satu dampak nyata dari diskriminasi ini adalah keterbatasan akses masyarakat asli Papua terhadap pekerjaan formal. Sebagian besar dari masyarakat Papua hanya dapat bekerja di sektor informal atau *low skill*, seperti buruh, petani kecil, atau pedagang kecil, tanpa kesempatan untuk masuk ke pekerjaan dengan gaji yang lebih layak.

Diskriminasi ekonomi terhadap masyarakat asli Papua masih menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan di Papua, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, menjadi indikator nyata dari ketimpangan ini. Salah satu dampak nyata dari diskriminasi ini adalah keterbatasan akses masyarakat asli Papua terhadap pekerjaan formal. Sebagian besar dari masyarakat Papua hanya dapat bekerja di sektor informal atau *low skill*, seperti buruh, petani kecil, atau pedagang kecil, tanpa kesempatan untuk masuk ke pekerjaan dengan gaji yang lebih layak.

Namun, ada angin segar yang bisa menjadi harapan bagi masyarakat Papua kedepannya. Menurut PUSLAPDIK Kemendikbudristek, sebanyak 17,35% atau 1.321 penerima beasiswa anggaran 2023 adalah siswa lulusan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang berasal dari Papua, Daerah Khusus dan Repatriasi. Untuk siswa yang bukan lulusan ADEM pun persentasenya cukup tinggi, yaitu 42,43% atau 3.231 mahasiswa dari wilayah Papua. Program-program beasiswa dan program lainnya yang dijalankan pemerintah pusat tentu diharapkan bisa meningkatkan pemerataan pembangunan di Indonesia, melalui peningkatan kesempatan belajar.

Peran Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP). Pasal 3 mengatur bahwa setiap pekerja asli, baik yang kompeten, berhak untuk: memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan di Provinsi Papua Barat; menerima perlakuan yang sama dari pengusaha tanpa diskriminasi. Ini memastikan bahwa tenaga kerja OAP tidak didiskriminasi dalam proses perekrutan dan perlakuan di tempat kerja. Pasal 14 (1) menetapkan bahwa semua bidang pekerjaan di Provinsi Papua Barat harus memprioritaskan OAP dengan komposisi berikut: tenaga kerja OAP sebesar 80% (*eighty percent*) dan tenaga kerja lokal sebesar 20% (*twenty percent*). Ini menunjukkan komitmen untuk mendorong OAP untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal dan mengurangi perbedaan pekerjaan antara OAP dan non-OAP (Sakmaf & Karauwan, n.d.).

Pemerintah Papua dapat mengoptimalkan kebijakan otonomi khusus (Otsus) untuk mengatasi diskriminasi ekonomi terkait hak kesempatan kerja. Dana Otsus, yang telah meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp 13 triliun pada tahun 2020, dialokasikan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan Trans Papua untuk mempercepat logistik. Dengan memperluas kesempatan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi lokal, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (*Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua*, 2020).

Selain itu, pemerintah mendukung program seperti Papua Youth Creative Hub, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan menciptakan lingkungan inovasi bagi generasi muda Papua. Program-program ini mencakup integrasi program pemberdayaan ekonomi, pembangunan sekolah, dan beasiswa afirmasi pendidikan (*Membangun Papua, Membangun Indonesia*, 2021). Masyarakat asli Papua (OAP) diprioritaskan untuk mendapatkan dukungan melalui program perlindungan sosial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka (Warda et al., 2022). Dengan memperluas akses ke sumber daya seperti pekerjaan, sekolah, dan pendidikan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Agar kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Papua, implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala diperlukan.

Efektivitas Dari Peran Pemerintah (Effectiveness of the government's role)

Otonomi khusus sendiri dibuat pemerintah pusat untuk memberi perlindungan terhadap hak dasar orang asli Papua demi menjunjung tinggi nilai persamaan kedudukan, hak serta kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Otsus diadakan sebagai jawaban dari keresahan masyarakat OAP khususnya di bidang ekonomi mengenai kehadiran pendatang yang justru menciptakan persaingan tidak adil dilihat dari kurangnya kualitas SDM OAP yang masih dibawah jika dibandingkan pendatang. Pemerintah pusat melakukan alokasi dana anggaran otonomi khusus untuk membangun sektor pelatihan masyarakat guna menciptakan sumber daya yang ahli.¹

Pemerintah pusat dan daerah sangat fokus kepada kebijakan yang menekankan kuota afirmasi (Affirmative Action) khusus untuk Orang Asli Papua ketika melamar kerja di bidang birokrasi, pertahanan dan keamanan seperti PNS dan TNI. Ada Pula kuota afirmasi di bidang pendidikan kedinasan/vokasi. Namun beberapa orang

¹ Riris Katharina, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 204.

berpendapat bahwa hal tersebut hanya untuk memenuhi target orang yang bekerja tanpa melihat latar belakang pendidikan, pengalaman atau skill yang dimiliki akan menyebabkan tidak adanya korelasi dengan penurunan kemiskinan.² hal ini sudah dibuktikan dan dilihat dari angka 95% OAP yang terserap lapangan kerja namun masih tinggi pula angka kemiskinan di Papua.³

Yang menjadi fokus utama pemerintah seharusnya bukan hanya kuota afirmasi namun juga diikuti dengan ditingkatkannya kualitas pendidikan, skill dan juga keterampilan tenaga kerja. Sementara itu MRP atau Majelis Rakyat Papua pada november 2024 mendesak sejumlah kementerian untuk memastikan hak-hak dasar OAP terpenuhi lewat kebijakan afirmasi dalam CPNS dan sekolah kedinasan. Mereka berpendapat bahwa penerimaan CPNS khusus OAP, promosi tenaga honorer dan kontrak, serta kuota afirmasi Sekolah Kedinasan mampu memenuhi hak-hak dasar OAP bersama dengan dampaknya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu pembangunan daerah Papua (Hamadi, 2024).

Dampak dari berbagai kebijakan sebagai solusi dari permasalahan diskriminasi ekonomi yang dialami oleh Orang Asli Papua bisa kita lihat dari sejauh mana efektivitas dan manfaat yang telah dirasakan mereka. Program Papua Youth Creative Hub berdampak sangat baik untuk pengembangan pemuda sedari awal mengenali pentingnya pertumbuhan ekonomi lokal khususnya untuk daerah mereka. hal ini dapat mengembangkan serta menggali potensi pemuda untuk membangun wirausaha yang akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat papua.

Dapat diketahui bahwa pada provinsi Papua Barat Agustus 2024 terjadi penurunan angka pengangguran terbuka atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan sebanyak 0.05 persen poin dibandingkan dengan data pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2023. hal ini disebabkan pertumbuhan lapangan usaha yang tertinggi adalah industri pengolahan, pertambangan, dan penggalian. Maka dapat diketahui bahwa upaya- upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberi dampak efektif pada pengurangan angka pengangguran di Papua.

D. Kesimpulan

Pada hakikatnya kesempatan kerja harus dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya pasti terdapat berbagai macam tantangan yang menyerang demokrasi ini. Khususnya yang kami bahas dalam penelitian ini adalah tantangan demokrasi terkait diskriminasi ekonomi yang dirasakan masyarakat

² Mesak Lek, Berkat & Bencana Otonomi Khusus Papua: Suatu Kajian Akademik(Bogor : PT Penerbit IPB Press, 2018), hal. 174.

³ Ibid

papua. Hubungan antara diskriminasi yang mempengaruhi stabilitas demokrasi adalah demokrasi sangat berperan penting dalam mengatasi diskriminasi melalui berbagai tindakan yang direncanakan oleh pemerintah. diskriminasi yang dialami masyarakat papua meliputi sempitnya kesempatan kerja yang ada dikarenakan migrasi yang dilakukan warga non-OAP yang unggul dalam hal skill dan modal. belum lagi adanya program transmigrasi dari pemerintah yang seolah-olah menjadi ancaman baru yang mereka dapatkan. Maka dari itu pemerintah harus fokus dalam perannya mengatasi permasalahan diskriminasi ekonomi yang terjadi di papua bukan malah menambah masalah baru dengan mengadakan program transmigrasi. Terdapat dampak yang signifikan dari kebijakan otonomi khusus dan program papua youth creative hub yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat papua sendiri sangat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut yang menjadi sarana mendapatkan pembekalan dan sertifikasi untuk menunjang mendapatkan pekerjaan maupun membuka lapangan pekerjaan.

REFERENSI

- Ardianyah, Risnita, & Jailani, M. S. (Juli). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 1(2). <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ashila, B. I., Paulina, A. L., Assyifa, A., & Az - zahro, S. S. (2024). *DISKRIMINASI DI INDONESIA DAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN YANG KOMPREHENSIF BAGI KORBAN*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN). <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/08/Booklet-Diskriminasi-di-Indonesia-dan-Pentingnya-Perlindungan-yang-Komprehensif-bagi-Korban.pdf>
- EU Action Plan on Human Rights and Democracy Adopted. (2020, December 02). Retrieved November 28, 2024, from <https://www.nhc.nl/eu-action-plan-on-human-rights-and-democracy-adopted/>
- EU Anti-racism Action Plan 2020-2025. (n.d.). https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
- Fourth phase (2020-2024) of the World Programme for Human Rights Education. (n.d.). ohchr. Retrieved November 28, 2024, from <https://www.ohchr.org/en/resources/educators/human-rights-education->

[training/world-programme-human-rights-education/fourth-phase-2020-2024-world-programme-human-rights-education](#)

Human Rights and Democracy: striving for dignity and equality around the world. (2020, March 25). Retrieved November 28, 2024, from https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/news/human-rights-and-democracy-striving-dignity-and-equality-around-world-2020-03-25_en

Katharina, R. (2018). *Menakar capaian otonomi khusus Papua*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Komnas HAM RI. (2022). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan*. Komnas HAM RI. [https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-\\$N6ES1.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-$N6ES1.pdf)

Membangun Papua, Membangun Indonesia. (2021, Oktober 21). Retrieved November 28, 2024, from <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3352/membangun-papua-membangun-indonesia?lang=1>

Policy Brief | Tinjauan Terhadap RPJMN 2020-2024 Pembangunan Wilayah Papua. (2020, Februari 5). Retrieved November 28, 2024, from <https://pattiro.org/2020/02/policy-brief-tinjauan-terhadap-rpjmn-2020-2024-pembangunan-wilayah-papua/>

Racial Inequality in the United States | U.S. Department of the Treasury. (2022, July 21). Treasury. Retrieved November 25, 2024, from <https://home.treasury.gov/news/featured-stories/racial-inequality-in-the-united-states>

Racial Discrimination in Contemporary America | CEA. (2024, July 3). The White House. Retrieved November 25, 2024, from <https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2024/07/03/racial-discrimination-in-contemporary-america/>

Racial Disparities in Education and the Role of Government. (2020, June 29). <https://www.gao.gov/blog/racial-disparities-education-and-role-government>

Rusandi, & Rusli, M. (n.d.). *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*, 2(1).

Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani, Ed.). pt kanisius 1.

Structural Racism and Discrimination. (2021, March 2). National Institute on Minority Health and Health Disparities. Retrieved November 25, 2024, from <https://www.nimhd.nih.gov/resources/understanding-health-disparities/srd.html>

Warda, N., Kurniawan, A., Widyaningsih, D., Andriyani, S., & Nurshadrina, D. S. (2022). *SERI CATATAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF*

UNTUK ORANG ASLI PAPUA.
https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/pb_kurawal_kompilasi.pdf
Web, A. (2024). Pansus Afiriasi MRP Minta Penerimaan CPNS dan Sekolah
Kedinasan Harus 100 Persen OAP. Retrieved from
<https://www.jurnalmamberamofoja.com/pansus-afiriasi-mrp-minta-penerimaan-cpns-dan-sekolah-kedinasan-harus-100-persen-oap/>